

Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012 (*Causative Factors Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012*)

Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Konflik etnis Rakhine dan Rohingya disebabkan oleh kebijakan junta militer Myanmar untuk mendirikan negara bagian di Myanmar Barat, Rakhine dengan memberikan *privilege* kepada minoritas penduduk Rakhine daripada mayoritas warga Rohingya, padahal kebijakan yang diberlakukan oleh junta adalah negara bagian terbentuk atas dasar kelompok etnis mayoritas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan data berbasis pada penelitian pustaka yang diperoleh dari jurnal, koran on-line, artikel ilmiah, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisa data yang bersifat deskriptif. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan sejarah politik dan *ethnoconflict* untuk menganalisis data yang bukan berbentuk numerik. Dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar tahun 2012, penulis menggunakan kerangka teori *ethnoconflict* Michael E. Brown. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik etnis Rohingya dan Rakhine tidak lepas dari keterlibatan junta militer. faktor-faktor penyebab konflik etnis dilihat dari faktor struktural yaitu negara lemah dan geografi etnis, politik berupa diskriminasi institusi politik, elit politik yang dikuasai oleh junta militer dengan adanya kebijakan *Burmanisasi* dan nasionalisme agama Buddha, diskriminasi ekonomi karena modernisasi Provinsi Rakhine dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur pelabuhan Sittwe dan pembangunan eksplorasi gas Shwe. Selain itu, faktor pemicunya adalah pembunuhan dan pemerkosaan seorang gadis Rakhine bernama Ma Thida Htwe dan tidak diakui warga Rohingya, etnis Bengali sebagai penduduk asli Myanmar sehingga membuat mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dari junta militer.

Kata Kunci: Etnis, Militer, Konflik, Rakhine, Rohingya,

Abstract

A conflict with the Rakhine ethnic Rohingya was caused by the military junta's decision to establish a state in western Myanmar, Rakhine with give privilege to the minority of Rakhine rather than the majority population of Rohingya, whereas policies imposed by the junta of the state are formed on the basis of the majority ethnic group. In this study, the writer was using a research method by the collection of data based on the research literature obtained from journals, on-line newspapers, scientific articles, and others. In addition, this research used a descriptive analysis. In writing this paper the author used political history and ethnoconflict approach to analyze the data. In explaining the factors causing ethnic conflicts Rakhine and Rohingya in Myanmar in 2012, the author used a theoretical framework ethnoconflict Michael E. Brown. The results showed that the Rohingya and Rakhine ethnic conflict can not be separated from the involvement of the military junta. Causative factors of ethnic conflict seen from the structural factors that weak states and ethnic geography borders, political discrimination in the form of political institutions, political elites are ruled by a military junta with the policy Burmanisasi and Buddhism religion nationalism, economic discrimination due to modernization Rakhine province with the port infrastructure development projects Sittwe Shwe gas exploration. In addition, the trigger factor was the murdered and raped of a Rakhine girl named Ma Thida Htwe and non-recognition of Rohingya, ethnic Bengali as a native of Myanmar so as to make them get discrimination from the military junta.

Keywords: Conflict, Ethnic, Rakhine, Rohingya, Military .

Pendahuluan

Konflik bernuansa etnis pada dasarnya merupakan masalah etnis yang dalam kehidupan politik berada di latar belakang, dipandang sebagai masa lampau. Pada umumnya

konflik etnis ini pecah didorong oleh berbagai kekecewaan berlarut-larut di dalam negara nasionalnya sehingga muncul gerakan-gerakan etnis yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik, minimal untuk mendapatkan perhatian dan otonomi, maksimal untuk mendirikan negara berdasar pada

kelompok etnisnya. Perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan etnis dan agama merupakan masalah yang sangat peka dan mudah menyulut konflik-konflik terbuka bahkan dapat mencapai tingkat intensitas kekerasan yang tinggi, menelan banyak korban jiwa seperti konflik etnis Rakhine yang beragama Buddha dengan Rohingya yang beragama Islam di Provinsi Rakhine, Myanmar Barat.

Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824 [1]. Tercatat ada 135 etnis namun warga Rohingya etnis Bengali tidak termasuk didalamnya [2]. Bukan hanya dilatarbelakangi heterogenitas etnis saja yang menyebabkan konflik antar etnis melainkan juga disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas (memberikan hak *privilege* pada etnis tertentu).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang didapat dari sumber-sumber terpercaya, baik yang berasal dari jurnal, koran on-line, artikel ilmiah, majalah politik maupun buku terbitan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Metode analisis data penulisan jurnal ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik antar etnis di Provinsi Rakhine.

Dasar pola berpikir menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan informasi secara sistematis, terarah, dan konsisten. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang berhubungan dengan kasus-kasus mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer Myanmar dan etnis Rakhine terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.

Pembahasan

Faktor yang mendorong konflik bernuansa etnis antara Rohingya dengan Rakhine di Myanmar lebih banyak dikarenakan diskriminasi yang dialami etnis Rohingya sehingga menimbulkan *chaos* di Provinsi Rakhine. Mereka menciptakan perselisihan dengan penduduk lokal notabene etnis Rakhine yang hidup berdampingan dengan mereka.

A. Faktor Utama Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar

· Faktor Negara yang Lemah

Tindakan junta militer yang cenderung represif menjadikan rasa aman semakin terabaikan bagi masyarakat sipil, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik yang otoriter. Hal inilah yang membuat konflik etnis yang melibatkan etnis Rakhine dengan Rohingya mengalami *security dilemma* yang berujung pada ketidakstabilan Provinsi Rakhine karena masing-masing kelompok tidak bisa menentukan, apakah mereka dalam posisi bertahan atau menyerang sehingga mereka terus

berusaha meningkatkan akses-akses pertahanan-keamanan etnisnya terhadap kelompok lain secara sembunyi-sembunyi.

Selain itu, adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin hari semakin rendah dimana dari 3.183.330 jiwa [19] sebesar 85% penduduk menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, namun produktivitas pertanian menurun beberapa tahun terakhir seiring dengan iklim yang tidak bersahabat. Hal tersebut mendesak etnis Rakhine untuk menguasai tanah pertanian etnis Rohingya demi meningkatkan produktivitas pertanian. Mereka melakukan pengusiran, penjarahan, pembakaran hidup-hidup etnis Rohingya dibantu oleh junta militer atas otoritas biksu-biksu Rakhine.

Sumber daya alam Provinsi Rakhine dikuasai oleh etnis Burma akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia dari penduduk lokal dan lebih memprioritaskan etnis Burma untuk mengelola jalur pipa ganda China di desa Kyaukpyu [20]. Jalur pipa tersebut yang mengalirkan pasokan minyak bumi dari Teluk Benggala menuju sejumlah provinsi yang ada di wilayah China. Dalam mengelola jalur pipa ganda China, penduduk lokal tidak dilibatkan dan tidak bisa mengakses pekerjaan dalam industri tersebut, sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan. Keamanan sering terusik karena pengawasan institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan industri yang mengawasi jalur pipa ganda China tersebut sangat ketat sekali sehingga sering berakhir ricuh ketika masyarakat sekitar yang terdesak kebutuhannya berusaha untuk meningkatkan kualitas kebutuhan dasar mereka dengan berupaya memasuki kawasan industri secara ilegal. Kondisi perekonomian memburuk membuat konflik etnis antara warga Rohingya etnis Bengali dengan etnis Rakhine terus berlanjut bahkan sepanjang tahun 1972-1980 terjadi kerusuhan yang berujung pada krisis legitimasi pemerintahan. Pada masa junta militer berkuasa, pengangguran diperkirakan di atas 10%, dari populasi penduduk Myanmar yang mendekati 50 juta, ada 29 juta pekerja, tetapi 70% dari pekerja berada di sektor pertanian dan hanya 15% datang dari industri. Inflasi yang tinggi sebesar 20% dengan 25% rakyat Myanmar hidup dibawah garis kemiskinan menyebabkan rakyat menjadi masyarakat yang sering terlibat konflik komunal dan sektarian karena kebutuhan ekonomi mereka yang sulit terpenuhi [21]. Korupsi dengan indeks 1.9% menempati peringkat 160 dari 163 negara sebagai negara terkorup di dunia [22] turut membuat konflik etnis semakin besar bahkan Myanmar dicap sebagai negara termiskin dengan GDP Perkapita pada tahun 2006 adalah \$1800 [23].

Pasca perang dingin memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi Myanmar. Negara itu harus menyesuaikan diri pada pengaruh global dengan menjalankan reformasi politik dan ekonomi supaya memperoleh akses yang lebih luas dalam pencatatan politik internasional. Sejak Myanmar dikuasai oleh junta militer dibawah kepemimpinan Than Shwe (1992-2010), negara itu cenderung mengisolasi diri dan baru beberapa tahun terakhir dibawah pemerintahan Presiden Thein Sein mencoba lebih terbuka namun masih tetap menyisakan

permasalahan tersendiri dalam konflik komunal dan sektarian yang melibatkan etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali di Provinsi Rakhine [24].

Secara umum junta militer telah menyembunyikan distribusi kekayaan yang sesungguhnya, 10% warga Myanmar yang paling miskin hanya mengkonsumsi 2,8% kekayaan nasional, sedangkan 10% populasi yang terkaya mengkonsumsi 32,4% (statistik tahun 1998) [25].

· **Faktor Geografi Etnis**

Faktor mendasar yang mendorong terjadinya konflik dan kekerasan di Provinsi Rakhine adalah morfologi fisik pemukiman. Pola pemukiman yang berubah menjadi model sosio ekonomi yang eksklusif telah menumbuhkan citra negatif kelompok bermodal (baca:warga Rohingya etnis Bengali). Pada sisi lain, kondisi perkotaan yang semakin parah telah memberikan tekanan tersendiri bagi warga kota secara umum. Komposisi penduduk yang tidak seimbang menyebabkan hubungan antara kedua etnis sering dilanda konflik.

Tercatat Sittwe dengan luas 12.504 km²(estimasi tahun 2002) berpenduduk 1.009.568 jiwa sedangkan di Kyaukpou dengan luas 9.984 km² berpenduduk 296.736 jiwa telah mendorong perselisihan semakin besar antara urban dengan penduduk lokal terutama di perkotaan, hal ini dikarenakan luas daya dukung lahan dan jumlah penduduk yang tidak sebanding [26]. Dampaknya, sentimen etnis terhadap kelompok modal yang selama ini tersembunyi, menjadi mengemuka karena mereka dianggap dampak dari krisis ekonomi. Hal ini sebenarnya telah terjadi sejak Inggris mengalami resesi ekonomi pada abad 17 yang mengakibatkan konflik etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali, dimana kaum Rohingya notabene kaum Chettyar dianggap sebagai dampak dari krisis ekonomi [27].

· **Faktor Keamanan Negara yang Lemah**

Sistem keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah cenderung mengalami kegagalan karena tidak disertai dengan pertimbangan kekuatan politik yang nyata (hanya sekedar legalitas formal saja) sehingga konflik etnis makin berkembang secara luas karena tidak didukung dengan angkatan pertahanan dan keamanan negara secara memadai. Milisi Rohingya yang cenderung memiliki kekuatan bersikap untuk menyerang daripada bertahan. Mereka melakukan tindakan teror dan penyerangan secara nyata yang ditujukan kepada masyarakat sipil yaitu etnis Rakhine. Sejak saat itu, situasi Provinsi Arakan/Rakhine mencekam dan sering terjadi perselisihan antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya.

Terlebih lagi, pemerintah junta militer membeli tanah penduduk secara paksa bahkan melakukan pembangunan jalan raya mengarah ke pusat-pusat pemukiman para perwira senior dan saudara mereka. Pembangunan ini melibatkan warga Rohingya etnis Bengali yang diperkerjakan secara paksa tanpa upah. Tercatat bahwa tahun 1996, pemerintah membangun jalan raya di Sittwe sepanjang bandara dengan membeli tanah penduduk desa secara paksa dan harganya pun terbilang murah [28]. Selain itu, tiga jalan raya yang menghubungkan Ann ke Minbya menuju pusat kota Rakhine, Taunggye ke Pamtaung menuju selatan pusat kota Rakhine, dan Gwa ke Ngathaingchaung juga menuju pusat

kota menimbulkan kericuhan ketika pemerintah dalam hal ini junta militer melakukan pengambilan tanah penduduk secara paksa tanpa adanya kompromi, mereka tidak pula menggunakan negoisasi yang mengedepankan logika etnis dalam reformasi tanah sehingga menimbulkan perlawanan masyarakat setempat.

Etnis Rohingya yang banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan kekecewaannya pada etnis Rakhine yang jauh lebih dilindungi oleh pemerintah junta militer [29]. Pemerintah berupaya merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian massa, pengusiran, pembakaran dan pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, dan sejumlah tindakan brutal lainnya telah dilakukan oleh junta militer dibantu oleh para biksu Rakhine untuk memusnahkan etnis Rohingya [30].

B. Faktor Politik

· **Politik antar Elit**

Konflik antar etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali terjadi dikarenakan junta militer selalu menyebarkan pamflet-pamflet bernada anti Muslim yang ditujukan pada etnis Rohingya, pamflet-pamflet tersebut juga didistribusikan secara luas oleh para biksu Rakhine bahkan junta militer mendukung upaya para biksu dalam menuntut agar Masjid Hantha di Taunggye dihancurkan, Muslim yang tidak terima atas kesewenangan mereka terlibat pertikaian dengan penduduk setempat sebanyak 200 Muslim tewas, 11 masjid hancur, dan 400 rumah terbakar [31]. Sejak saat itu, banyak warga Muslim Rohingya mengalami ketakutan yang luar biasa [32].

Keberadaan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin terancam oleh tindakan yang sewenang-wenang seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid dan pemerkosaan. Sejak saat itu, kebencian warga Muslim Rohingya semakin besar dengan etnis Rakhine dan konflik antar keduanya sering menimbulkan kerusakan dan pertikaian berlarut-larut di Provinsi Rakhine. Sementara itu, komandan regional yang mempunyai kekuasaan penuh akan daerah yang mereka kuasai cenderung mempunyai kebijakan yang memicu konflik dengan menentukan hak politik dalam kerangka etnis dan bukan dalam nasionalisme sipil, bahkan mereka sering menyebarkan pamflet bernada anti Muslim yang justru membuka kebencian komunal melalui media.

Banyak biksu juga terpengaruh oleh inisiatif junta militer dengan menyebarkan selebaran-selebaran serupa di daerah Taunggye, sehingga banyak Muslim yang mendapatkan penganiayaan tanpa alasan jelas dari penduduk setempat [33]. Kondisi tersebut justru menebar kebencian yang berujung dendam sehingga konflik sulit mencapai penyelesaian damai. Selain itu, dengan adanya kekuasaan penuh dari komandan regional akan daerah yang mereka kuasai, keberadaan polisi sipil dianggap sebagai pesaing dan penghinaan terhadap profesionalisme prajurit dan citra diri para perwira bahkan polisi sipil dianggap merusak kemampuan perwira dalam mempertahankan kepentingan mereka bersama. Polisi sipil diidentifikasi oleh sektor komunitas militer dengan kepentingan politik tertentu dan tidak lagi mewakili otoritas legitimasi dalam menegakkan hukum dan ketertiban sehingga polisi sipil merasa tidak

diuntungkan dan dipinggirkan sebagai aparat keamanan [34]. Militer berusaha menciptakan kepercayaan terhadap identitas militer sebagai pesona yang netral dan bebas serta dihormati dengan memperkecil peran polisi sipil dan membatasi kepemilikan senjata mereka dalam proses pengamanan sipil. Ketika pergolakan sipil tidak lagi dapat dikendalikan dengan sarana non-militer maka keterlibatan militer menjadi penting seperti pada tanggal 10 Juni 2012 dimana keadaan darurat diberlakukan di Rakhine Utara dengan mengerahkan kapal perang Angkatan Laut untuk berpatroli di sekitar perairan Myanmar di pantai Barat terutama yang berbatasan langsung dengan Provinsi Rakhine [35].

Konflik yang melibatkan etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali disinyalir untuk menciptakan kepercayaan terhadap identitas militer dengan mengurangi peran polisi sipil dan membatasi kepemilikan senjata mereka dalam proses pengamanan masyarakat. Oleh karena itu, konflik antara etnis Rakhine dengan Rohingya tidak mampu dikendalikan oleh polisi setempat mengingat persenjataan mereka untuk meredam kerusuhan terbatas.

• **Burmanisasi**

Sejak junta militer berkuasa kebijakan Burmanisasi semakin gencar dilakukan dengan menerapkan program *model village* yaitu suatu perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha seperti Buddha Rakhine dan orang Buddha lainnya yang sebagian besar berasal dari etnis Burma, mereka didatangkan secara massal dan dibekali kebutuhan hidup berupa pasokan bahan pangan dan disediakan rumah yang layak huni dari pemerintah [36]. Pembangunan *Model Village* semakin meningkat pesat dengan adanya bantuan dana dari Bank Dunia yang akan menyediakan dana hingga US\$80 juta untuk mendanai proyek [37]. Junta militer menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun *model village*, mereka menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang Buddha di daerah-daerah mayoritas Muslim Rohingya. Pemerintah menggantikan tempat-tempat suci Rohingya dengan monumen bersejarah dan peninggalan Buddha berupa biara, pagoda Buddha dan asrama untuk biksu-biksu Rakhine. Etnis Rakhine direlokasi ke daerah-daerah *model village* yang merupakan daerah hasil rampasan tanah milik etnis Rohingya oleh junta militer. Sebanyak 50 desa dengan 200 keluarga Rakhine tinggal di desa tersebut [38]. Sementara itu, Muslim Rohingya kehilangan tanah mereka, menjadi tunawisma tanpa mata pencaharian. Dalam pengembangan wilayah perbatasan khususnya di Provinsi Rakhine, junta telah memberikan masing-masing tanah Rohingya untuk budidaya pertanian dan peternakan kepada etnis Rakhine.

Pemerintah memberikan bantuan perumahan pada etnis Rakhine seluas 0,2 hektar [39]. Mereka membagikan dana sebesar 40.000 Kyatt untuk masing-masing keluarga Rakhine, sebanyak 40 per kepala bebas biaya per bulan, sepasang lembu jantan dan satu gerobak sapi diberikan pada penduduk Rakhine. Setiap *model village* telah disediakan lima belas Tractors Honda untuk mengembangkan usaha pertanian etnis Rakhine [40]. Pembangunan proyek *model village* telah menimbulkan konflik antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya karena pemerintah melakukan upaya

diskriminasi terhadap warga Rohingya etnis Bengali dan lebih banyak memberikan perlindungan terhadap etnis Rakhine dan keluarga *Nasaka*.

• **Diskriminasi Politik**

Pada dasarnya, diskriminasi politik yang terjadi antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali karena politik identitas yang dipahami oleh masing-masing etnis semakin kuat. Mereka memaknainya sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa. Relasi kekuasaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang pokok bagi kelompok masyarakat notabene komunitas etnis karena mengandung nilai-nilai yang mendasar bagi mereka untuk dipertahankan ataupun diperebutkan. Mereka membentuk karakter pengakuan jati diri sebagai bagian dari proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara (*state*).

Politik identitas yang ada pada etnis tertentu telah menemukan bentuknya secara nyata, ketika ia merasa menjadi bagian dari minoritas, terpinggirkan dan tidak lagi menemukan adanya sebuah bentuk pengakuan dirinya maupun identitas etnisnya terhadap sebuah institusi organisasi apa pun termasuk dalam sebuah negara. Pernyataan itu sama halnya dengan warga Rohingya etnis Bengali yang merasa mendapatkan perlakuan sewenang-wenang tidak hanya dari pemerintah junta militer tetapi juga dari elit-elit lokal Provinsi Arakan sehingga pada akhirnya mereka melakukan perlawanan. Selain itu, konsep keamanan nasional yang digunakan junta militer lebih mengupayakan untuk memaksakan dominasi pemerintahan yang dikuasai oleh etnis Burma (69%) menimbulkan konflik yang cukup pelik di Arakan/Rakhine karena adanya tujuan dari etnis Rakhine sebagai penduduk lokal untuk menghidupkan kembali kebudayaan asli dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman [41].

Pada tahun 1989, pemerintah junta militer memberlakukan perubahan nama dari Provinsi Arakan menjadi Provinsi Rakhine yang lebih memberikan hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi pada etnis Rakhine [42]. Hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan jumlah penduduk kurang dari 10% sehingga negara bagian ini dinamakan Rakhine bukan Rohang [43]. Oleh karena itu, mereka berupaya menekan mayoritas ataupun menghancurkannya seperti membentuk Gerakan Anti Muslim yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dari tahun 1997 sampai 1998, SPDC dikenal sebagai SLORC yang menggantikan peran Partai Sosialis Burma (BSPP) [44]. Para komando militer regional yang kuat sebelumnya menjadi anggota SLORC di tempatkan di Yangoon.

• **Ideologi Nasional yang Eksklusif**

Pada masa pemerintahan U Nu, pemerintah mencanangkan agama Buddha sebagai agama nasional dan merencanakan untuk membentuk 2 negara bagian baru yaitu Mon dan Rakhine (Arakan) yang belum masuk dalam *Union of Burma* [45]. Kebijakan politik yang kontroversial ini telah menimbulkan perselisihan antara etnis Rakhine dengan

warga Rohingya etnis Bengali karena sejak agenda kebijakan ini diberlakukan, pengaruh para biksu semakin besar dalam mempengaruhi situasi politik di Myanmar bahkan mereka memaksakan pandangan-pandangan mereka kepada seluruh masyarakat Burma termasuk terhadap warga Rohingya etnis Bengali yang beragama Muslim untuk merealisasikan agama Buddha Theravada sebagai agama nasional. Kaum radikal notabene etnis Rohingya yang tergabung dalam gerakan Mujahidin berusaha melawan etnis Rakhine dengan melakukan pembontakan, mereka kecewa terhadap perlakuan para biksu yang memaksa Muslim harus belajar nilai dan budaya agama Buddha untuk mempertahankan keberadaannya di Myanmar [46].

C. Faktor Ekonomi

· Krisis Ekonomi

Pada masa pemerintahan Than Shwe, junta militer telah melakukan pengalihan sumber pendapatan dan mengatur kesempatan kerja agar lebih merata kepada masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat kelas bawah, melakukan reformasi tanah dan kredit yang bersifat liberal kepada petani, menaikkan tingkat gaji minimum, memperluas jaminan sosial, kesehatan, rencana pendidikan, menarik perusahaan swasta menjadi milik negara, menarik pajak secara merata dan dikelola oleh negara [47]. Namun, kebijakan pemerintah tidak kunjung memperbaiki perekonomian nasional khususnya Provinsi Arakan/Rakhine yang tingkat perekonomiannya jauh lebih terbelakang.

Hal itu dikarenakan kebijakan sangat lemah, peraturan resmi yang tidak memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya terutama bagi pihak junta militer sendiri, inflasi tinggi yang termasuk dalam kategori 51,5% [48] (estimasi 1997) telah mempengaruhi nilai tukar Kyatt yaitu pada tahun 1997, nilai tukar resmi berada pada kisaran 6,7 Kyatt per dolar AS sedangkan dipasar gelap dijual senilai 400 Kyatt kemudian pada tahun 2003 nilai Kyatt terus melemah mencapai 900 Kyatt per dolar AS [49]. Merosotnya penghasilan riil telah membuat Myanmar jatuh pada kekacauan ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh pula di Provinsi Arakan. Sejak saat itu, etnis Rohingya tidak mempunyai kesempatan ekonomi yang memadai, mereka sering mengalami diskriminasi dibidang ekonomi oleh junta militer.

Kebijakan pemerintah secara menyeluruh atas lahan dalam *Tenancy Act 1963*, yang membatalkan hak milik atas tanah serta kebijakan negara yang menguasai lahan pertanian dalam perundangan *Settlement & Land Record Department* (SLRD) dibawah kementerian pertanian dan irigasi telah menyebabkan sebagian besar etnis Rohingya kehilangan tanah pertanian mereka seluas 5 hektar, di sisi lain Junta memberikan kepercayaan etnis Rakhine untuk mengolah lahan pertanian yang belum digunakan secara optimal padahal sebelumnya adalah milik etnis Rohingya [50]. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine.

Selain itu, junta Myanmar tidak mampu pula melepaskan ketergantungan pada negara-negara industri sehingga utang luar negeri mereka terus merangkak naik sepanjang tahun tercatat sebesar \$6 miliar pada tahun 2012 [51]. Kemiskinan berdampak pada ketidakpuasan rakyat.

Pada akhirnya membangkitkan ketidakpuasan kelompok-kelompok yang memiliki populasi dalam jumlah besar dan tinggal secara terpusat di suatu wilayah khususnya di perbatasan negara. Mereka akan cenderung melakukan pergerakan politik yang diarahkan dalam upaya pencapaian otonomi lebih besar bahkan menuntut untuk mendapatkan kemerdekaan. Hal tersebut telah terjadi di Provinsi Rakhine yang melibatkan etnis Rakhine sebagai mayoritas dengan warga Rohingya etnis Bengali sebagai minoritas. Melalui gerakan Mujahidin, warga Rohingya etnis Bengali berupaya menuntut otonomi yang lebih besar dan meraih kemerdekaan di wilayah Mayu perbatasan Myanmar-Bangladesh pada tahun 1947.

· Diskriminasi Ekonomi

Perekonomian yang lemah membangkitkan kelompok-kelompok etnis yang tidak mempunyai kesabaran tetapi integritas etnisnya besar berusaha merebut kekuasaan terutama dalam bidang ekonomi. Berbagai kelompok suku yang partisipasinya dalam kehidupan ekonomi terabaikan berusaha melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan menimbulkan ketegangan terhadap etnis lain. Seperti keputusan Inggris untuk menjadikan etnis Rakhine sebagai pegawai sementara menggantikan etnis Rohingya yang mogok. Kebijakan Inggris telah menimbulkan ketegangan antar masing-masing etnis. Selain itu, kepemilikan tanah oleh kaum Chettyar dengan memberikan sejumlah bantuan dana melalui sistem yang konservatif untuk menguasai tanah pertanian Arakan dinilai telah menimbulkan konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya. Chettyar menawarkan kredit seperti lintah darat terhadap etnis Rakhine yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, lambat laun kaum Chettyar notabene warga Rohingya etnis Bengali menjadi penguasa tanah Arakan dan dapat dikategorikan golongan ekonomi menengah keatas yang bermatapencaharian sebagai petani, pedagang dan penyedia jasa pelabuhan sedangkan etnis Rakhine yang kehilangan tanah memilih untuk menjadi buruh tani dan menjadi buruh pabrik milik Inggris [52].

Hal inilah yang menyebabkan konflik antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali karena kecemburuan sosial etnis Rakhine yang merasa bahwa keberadaan kaum Chettyar secara tidak langsung telah memperburuk kondisi etnis Rakhine menjadi warga miskin. Pada masa rezim otoriter Myanmar, junta militer berhasil membuat undang-undang baru "*The Union of Myanmar Foreign Investment Law*" yang menjadi payung hukum investor asing terhadap eksplorasi minyak dan gas di Myanmar.

Pelaksanaan perundang-undangan tersebut cenderung digunakan untuk menjaga kepentingan militer dan kelas menengah sehingga menimbulkan konflik karena terjadi benturan kepentingan korporat dalam hal ini kelas menengah dan distribusi manfaat perekonomian kepada kelas bawah. Pemerintah mengeluarkan persetujuan impor secara leluasa, terlibat dalam skandal seks dan korupsi.

Etnis Rohingya merasa dirugikan oleh tindakan junta militer yang diskriminatif telah menimbulkan perpecahan suku dan daerah berakhir dengan perang saudara, pembontakan, pertumpahan darah dan tindak kekerasan. Konflik ini semakin besar ketika pertikaian yang terjadi dilancarkan atas dorongan pemerintah terhadap kelompok

suku yang lain bahkan konflik itu menjadi lebih intens telah membawa pengaruh buruk bagi kondisi Myanmar pada umumnya dan Provinsi Arakan pada khususnya. Etnis Rakhine yang lebih banyak diberi kepercayaan junta militer untuk mengelola perekonomian seperti menjadi tengkulak beras, berdagang, dan penyedia jasa di pelabuhan. Hal tersebut menjadi penyebab konflik dengan etnis Rohingya karena mereka tidak diberi kesempatan oleh pemerintah dalam menjalankan akses-akses perekonomian bahkan ketika etnis Rohingya mulai merintis usaha untuk mendukung perkembangan ekonomi mereka, pemerintah dibantu oleh bikhsu-bikhsu Rakhine justru melakukan penjarahan terhadap toko-toko yang mereka bangun [53].

• **Pembangunan Ekonomi dan-Modernisasi**

Konflik antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya terjadi juga dikarenakan proses pembangunan ekonomi di Myanmar. Daerah Provinsi Arakan akan dijadikan tempat untuk mengembangkan pelabuhan yang dapat menjadi akses laut yang lebih efisien melalui Sungai Kaladan dari negara bagian di India Timur Laut disebut Mizoram. Pelabuhan Sittwe akan menjalani pengerukan luas dan pembangunan terminal baru untuk berlabuh yang memungkinkan kemudahan transaksi laut antara investor Burma dengan India untuk mengambil layanan arus utama dari dan menuju Calcuta. Tepatnya di Pulau Maday, kota praja Kyaukpyu dimana warga Rohingya etnis Bengali dan etnis Rakhine hidup berdampingan akan dibangun infrastruktur yang menghubungkan Provinsi India timur laut berbatasan langsung dengan Myanmar. Pemerintah junta militer Myanmar disinyalir mempunyai kepentingan tertentu dibalik insiden yang melibatkan dua etnis di Sittwe, Provinsi Arakan, Myanmar Barat mengingat desa Kyaukpyu yang merupakan wilayah pusat konflik menjadi jalur pipa ganda China, yang mengalirkan pasokan minyak dan gas bumi dari teluk Bengali menuju sejumlah provinsi yang ada di wilayah China. Selain berfungsi sebagai “pembersih jalan”, para tentara ini juga memberikan jaminan keamanan bagi para awak konsorsium. Dalam menjalankan tugasnya, para tentara Burma beroperasi seperti biasanya, yaitu melakukan pembakaran terhadap desa-desa disekitar, menggunakan tenaga kerja paksa, bahkan menyiksa dan membunuh penduduk lokal [54].

Pelanggaran HAM telah dilakukan oleh tentara Myanmar dalam proses eksplorasi di blok pengeboran minyak dan gas di lapangan gas Shwe blok A1 dan A3 di lepas pantai negara bagian Arakan seperti penggunaan tenaga kerja paksa dalam proses pembangunan infrastruktur perusahaan mereka di Myanmar, pengusiran paksa para warga desa untuk pembersihan jalur pipa ganda China di desa Kyaukpyu yang berada di Provinsi Rakhine. Eksplorasi gas di lepas pantai Provinsi Rakhine merupakan salah satu cadangan gas terbesar di Asia Tenggara. Sebagian besar masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan proyek tersebut adalah etnis Rohingya. Tanah mereka dikuasai junta militer tanpa kompensasi apa pun sedangkan etnis Rakhine mendapatkan kompensasi 200,000-700,000 Kyatt [\$230-805] per hektar dibandingkan dengan nilai pasar setidaknya satu juta Kyatt per hektar [\$1.150] [55].

Dalam pembangunan proyek, etnis Rohingya tidak mendapatkan kompensasi sepeser pun atas pembebasan

tanah mereka [56]. Kekecewaan etnis Rohingya semakin meningkat ketika etnis Rakhine dan junta militer menyerang mereka seperti melakukan penjarahan, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pembakaran hidup-hidup salah satu dari mereka.

Meskipun Provinsi Arakan/Rakhine merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, etnis Rakhine sebagai penduduk lokal di negara bagian Arakan/Rakhine menerima sedikit dari proyek-proyek pembangunan di daerah mereka. Sebagian besar penduduk Provinsi Arakan/Rakhine hanya menerima sekitar tiga jam listrik setiap hari. Sebagian besar wilayah Arakan/Rakhine belum tersentuh oleh listrik. Tercatat pada tahun 2009, konsumsi listrik dari penduduk yang berjumlah kurang lebih tiga juta jiwa ini hanya memakai 30MW atau 1,8% dari kapasitas total pemakaian listrik negara [57]. Pada bulan Desember 2009, pemerintah militer menambahkan tiga unit pembangkit tenaga listrik tenaga air di Saidin, Thahtay, Chaung, dan Laymromyit dengan biaya lebih dari US\$800 juta, tepatnya kota Ann dari Kabupaten Kyaukpyu di negara bagian Rakhine sedang diadakan pembangunan proyek PLTA yang diprakarsai oleh Departemen Tenaga Listrik di Ann Creek yang letaknya 3,5 km sebelah timur laut Ann. Apabila proyek ini selesai kemungkinan besar dapat menghasilkan 44 juta kilowatt pertahun [58].

Pembangunan pangkalan listrik ini justru menimbulkan permasalahan dimana dalam proses pembangunan proyek ini, junta militer melakukan berbagai operasi yang cenderung represif dan anarkis yaitu melakukan pembakaran terhadap desa-desa disekitar, menggunakan tenaga kerja paksa, menyiksa dan membunuh penduduk lokal. Dalam melancarkan operasinya agar tidak terlihat sebagai tindakan kriminalitas dan pelanggaran HAM, junta militer bekerja sama dengan penduduk lokal notabene etnis Rakhine untuk menekan laju populasi etnis Rohingya. Mereka berdalih bahwa tindakan represif tersebut dilakukan dalam upaya penegakan UU Kewarganegaraan tahun 1982. Kontitusi tersebut menyatakan bahwa etnis Rohingya sebagai imigran dari India dan Bangladesh bukan penduduk asli Myanmar [59].

D.Faktor Sosial dan Budaya

• **Sejarah Kelompok yang Bermasalah**

Pemahaman sejarah yang berbeda mengenai relasi antar kelompok etnis membuat etnis Rohingya dengan Rakhine sering berkonflik untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Menurut sejarah kronik etnis Rakhine memaparkan bahwa warga Rohingya khususnya etnis Bengali mendiami Arakan ketika Sultan Nazir Shah sebagai Sultan Gaur (Bengali) berinisiatif membantu mengembalikan kekuasaan Raja Narameikhla sedikit demi sedikit dari Kerajaan Ava. Berkat jasa Narameikhla membantu kerajaan Gaur dari serangan musuh, ia mengirimkan pasukan-pasukan perang yang sebagian besar berasal dari etnis Bengali untuk merebut kekuasaan Ava. Oleh karena itu, etnis Rakhine berkeyakinan bahwa warga Rohingya etnis Bengali bukan penduduk asli Provinsi Arakan (Rakhine) melainkan pendatang yang berasal dari Gaur (Bengali) [60].

Keyakinan etnis Rakhine semakin kuat bahwa mereka merupakan penduduk lokal Provinsi Arakan (Rakhine)

dengan adanya kronik Rakhine yang mengatakan bahwa Raja Marayu sudah menguasai Arakan sejak 3325 SM [61]. Kerajaan tersebut bernama Dhanyawadi yang mempunyai arti “diberkati oleh gandum yang melimpah”. Namun, etnis Rohingya tetap bersikukuh bahwa Provinsi Arakan(Rakhine) merupakan tanah leluhur mereka semenjak berdirinya kerajaan Islam Dhanyawadi pada tahun 146 masehi yang terletak di Teluk Bengal dan telah memperluas kekuasaan sampai ke Arakan [62].

Etnis Rohingya semakin bersikukuh bahwa mereka penduduk asli Arakan dengan adanya pilar batu Candra Ananda yang ditemukan di Sittaung Pagoda yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Islam telah menguasai wilayah Arakan pada tahun 1430 [63]. Selain itu, dilihat dari faktor sejarah, perasaan dendam menyelimuti etnis Rakhine ketika nenek moyang mereka menjadi korban kebiadaban dalam upaya penaklukan Kerajaan Mughal dimana banyak umat Buddha dan Hindu termasuk etnis Rakhine secara paksa dikonversi. Sementara itu, warga Rohingya etnis Bengali juga menaruh sakit hati terhadap etnis Rakhine dimana ketika Raja Arakan/Rakhine menyatakan perang terhadap kerajaan Mughal, mereka membakar kapal-kapal dagang Mughal, memenggal kepala mereka dan membunuh banyak orang Benggala (Bengali) termasuk orang-orang Islam di ibu kota, Sittwe.

• **Diskriminasi Budaya oleh-Pemerintah**

Penduduk Myanmar tidak pernah mengakui warga Rohingya etnis Bengali sebagai etnis, mereka menganggap sebagai “Muslim Arakan”, “Muslim Burma” atau “Bengal dari Burma” adalah nama-nama yang disematkan kepada Rohingya sebagai bahan ejekan. Tidak hanya pemerintah Burma yang mengintimidasi mereka, tetapi juga junta militer pun menggembar-gemborkan gerakan anti Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Burma sebagai bagian dari kampanye memusuhi Rohingya. Bagi junta militer gerakan tersebut cukup berhasil membuat warga Rohingya etnis Bengali keluar dari Myanmar. Masyarakat Rohingya banyak yang menghadapi diskriminasi oleh pergerakan demokrasi Burma.

Sebagian masyarakat Rakhine dan Burma menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnis, dan mereka telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. Etnis Rohingya merasa menjadi golongan kelas kedua sebagai masyarakat tertindas. Mereka berupaya meningkatkan solidaritas kelompok untuk melawan dominasi kekuasaan etnis Rakhine yang bekerjasama dengan junta militer. Oleh karena itu sangat disayangkan dengan adanya diskriminasi yang diberikan kepada etnis Rohingya, mereka rentan terhadap radikalisme karena dalam kondisi sangat tertekan dan menderita seperti saat ini, hal tersebut dapat terjadi dan akan sangat berbahaya karena dapat memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara termasuk selat Malaka [64].

E. Faktor Pemicu Konflik

• **Pemeriksaan Ma Thida Htwe**

Pemicu konflik mulai terjadi pada saat aparat pemerintah melakukan penahanan tiga tersangka atas pembunuhan seorang gadis yang bekerja sebagai tukang jahit dari etnis Rakhine, Ma Thida Htwe (27 tahun), putri U

Hla Tin, dari perkampungan Thabyechaung, Desa Kyauknimaw, Yanbye [65].

Ma Thida Htwe ditikam sampai mati disertai pemerkosaan oleh tiga orang dari etnis Rohingya yaitu Htet Htet (a) Rawshi bin U Kyaw Thaug (Bengali/Muslim), Rawphi bin Sweyuk tamauk (Bengali/Muslim) dan Khochi bin Akwechay (Bengali/Muslim)[66]. Aparat kepolisian Rakhine melakukan penahanan ketiga tersangka tersebut secara tidak transparan sehingga menekan amarah kedua etnis. Etnis Rakhine merasa bahwa tindakan ketiga pemuda tersebut telah melecehkan martabat wanita etnis Rakhine secara terang-terangan. Terlebih lagi, pengadilan yang seharusnya didirikan untuk menegakkan keadilan dan menghukum pihak yang bersalah justru menimbulkan kekacauan. Pengadilan khusus didirikan di kantor polisi Maungdaw, untuk warga Muslim Rohingya yang ditangkap oleh pasukan ‘keamanan’ (Hlun-tin dan Nasaka).

Pengadilan ini menjatuhkan hukuman tanpa penjelasan rinci dan akurat bahkan lebih berupaya untuk menghukum pihak yang tidak bersalah. Para tahanan Rohingya banyak dikirim ke penjara Buthidaung tanpa proses hukum yang transparan. Laporan terakhir menyebutkan bahwa di penjara Buthidaung sekitar 168 warga Rohingya yang masih ditahan dengan tuduhan membuat kerusuhan di Rakhine melanggar UU 148/506 [67].

• **Warga Rohingya Etnis Bengali Tidak Diakui sebagai Penduduk asli Myanmar**

Adanya UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadikan warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui kewarganegaraannya membuat nasib mereka penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan sadis dari junta militer Myanmar seperti penjarahan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pemerkosaan, dan pembunuhan secara sewenang-wenang melalui Operasi Nagamind tahun 1990. Etnis Rakhine sering terlibat perselisihan dengan etnis Rohingya karena mereka membantu dan mendukung junta militer Myanmar dalam berupaya *moslem cleansing* atau *ethnocide* terhadap etnis Rohingya seperti pemerkosaan, penjarahan toko yang dikelola warga Rohingya, pengrusakan rumah dan tempat ibadah, pembakaran hidup-hidup warga Rohingya, sekolah-sekolah Muslim, jembatan, dan jalan raya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sehubungan dengan faktor-faktor penyebab konflik di Provinsi Rakhine yang melibatkan etnis Rakhine dan Rohingya lebih banyak disebabkan oleh tindakan diskriminatif terhadap warga Rohingya etnis Bengali yang dilakukan oleh junta militer dengan para biksu Rakhine dibantu penduduk yang berasal dari etnis Rakhine. Dari segi faktor struktural yaitu negara yang lemah, geografi etnis karena perkembangan demografi penduduk antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya yang dipengaruhi keadaan geografis di Rakhine dan pendudukan kolonial Inggris yang melakukan pemilahan garis batas negara tanpa

memperhatikan logika etnis dan keamanan negara yang lemah.

Dari segi faktor politik yaitu politik antar elit, kebijakan Burmanisasi yang dilakukan oleh junta militer dengan menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun *model village*, mereka menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang Buddha di daerah mayoritas Muslim Rohingya secara paksa dan diskriminasi politik yaitu upaya junta militer melakukan diskriminasi politik terhadap warga Rohingya dengan membekukan aktivitas politiknya. Faktor diskriminasi ekonomi yaitu etnis Rakhine yang lebih banyak diberi kepercayaan junta militer untuk mengelola perekonomian sedangkan etnis Rohingya tidak diberi kesempatan oleh pemerintah dalam menjalankan akses-akses perekonomian.

Sedangkan dari faktor pembangunan ekonomi dan modernisasi yaitu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek telah melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap penduduk lokal dalam proses pembangunan proyek tersebut. Mayoritas yang menjadi korban adalah etnis Rohingya. Mereka tidak mendapatkan kompensasi atas kehilangan tanah bahkan junta militer melakukan penjarahan, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pembakaran hidup-hidup salah satu dari mereka sedangkan etnis Rakhine justru mendapatkan perlindungan dari junta militer atas otoritas yang didapat dari biksu-biksu Rakhine. Dari segi sosial dan budaya yaitu sejarah kelompok yang bermasalah berupa perasaan dendam etnis Rakhine ketika nenek moyang mereka menjadi korban kebiadaban Kerajaan Mughal dimana banyak umat Buddha dan Hindu secara paksa dikonversi untuk dijadikan budak.

Faktor pemicu konflik etnis antara Rakhine dan Rohingya adalah pemerkosaan seorang gadis dari perkampungan Thabyechaung, Desa Kyauknimaw, Yanbye yang bernama Ma Thida Htwe dan diskriminasi yang dilakukan oleh junta militer dibantu biksu-biksu Rakhine terhadap warga Rohingya etnis Bengali yang tidak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Myanmar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab konflik etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012 dengan menggunakan kerangka konseptual Michael E. Brown dapat dilihat penyebab konflik dari sudut ekonomi, politik, sosial, budaya, dan struktural secara terperinci bahkan konflik dapat diteliti dari faktor eksternal yang menjelaskan tidak hanya situasi dan kondisi dalam negeri saja yang berpengaruh tetapi juga dari luar negara seperti negara tetangga yang tidak baik dan tekanan dari negara-negara besar. Namun, masih terdapat kelemahan yaitu kurang mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik secara mendalam dari segi historis penyebab konflik.

Selain itu, kerangka konseptual Michael E. Brown kurang mampu mengkerucutkan penyebab konflik secara lebih detail dan mendalam. Faktor-faktor penyebab konflik lebih menekankan pada jangkauan yang lebih luas dan umum seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan struktural. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk menggunakan kerangka konseptual lain seperti yang lebih

implisit seperti teori konflik etnis John Galtung dan T.R Gurr.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan jurnal ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada,

- Drs. Djoko Susilo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Suyani Indriastuti, S. Sos, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan jurnal ini;
- Ibunda Hetty Suprihatin dan ayahanda Batur Subagyo yang tercinta;
- Adik-adikku tercinta, Senja Sakti dan Sirria Panah Alam;
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian jurnal ini.

Daftar Pustaka

- [1] <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/> Myanmar.Masih.seperti.Dulu. [28 Maret 2013, 06:14 WIB]
- [2] Ariyanto, Is. (2012). *Nestapa Rohingya, ujian bagi Suu Kyi*. <http://www.solopos.com/2012/08/01/nestapa-rohingya-ujian-bagi-suu-kyi-206259>. [12 November 2012, 09:37 WIB]
- [3] Mial, Hugh. Dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGravindo Persada.
- [4] Rohingya: Bengali Muslim or Rohingya Arakan. Tersedia dari *EBO Briefing Paper*, 2009, No. 2.
- [5] *Ibid*.
- [6] *Human Right Watch*. (2012). *The International Alliance to End Genocide*. <http://www.genocidewatch.org/myanmar.html>. [13 November 2012, 08:18 WIB]
- [7] *Kistyarini*, (2012), *Kondisi Pengungsi Mengenaskan*, <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/13/07323837/Kondisi.Pengungsi.Mengenaskan>. [6 September 2012, 10:02 WIB]
- [8] Hindstrom, Hanna. (2012). *Three Men Given Death Sentence for Murder that Sparked Riots*. <http://www.dvb.no/news/three-men-given-death-sentence-for-murderthat-sparked-riots/22512>. [23 Maret 2013, 07:51 WIB]
- [9] *Ibid*.
- [10] *Human Right Watch*. (2012). *The International Alliance to End Genocide*. <http://www.genocidewatch.org/myanmar.html>. [13 November 2012, 08:18 WIB]
- [11] *Kistyarini*. (2012). *Kondisi Pengungsi Mengenaskan*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/13/07323837/Kondisi.Pengungsi.Mengenaskan>. [6 September 2012, 10:02 WIB]
- [12] Purwanti, Niken. (2012). *Kekerasan Baru Ancam Myanmar*, <http://www.solopos.com/2012/10/30/konflik-myanmar-kedua-kubu-persenjatai-diri-kekerasan-baru-ancam-myanmar-3433489>. [31 Oktober 2012, 08:13 WIB]

- [13] Siraaj. (2012). *Dua Masjid Diserang Granat di Negara Bagian Karen, Myanmar*. <http://www.arahmah.com/read/2012/10/31/24370-dua-masjid-diserang-granat-di-negara-bagian-karen-myanmar.html>. [23 Maret 2013: 08:05 WIB]
- [14] *Ibid.*
- [15] Mazaya, Hanin. (2013). *Biksu Budha Myanmar Menyeru Kaum Budha untuk Memboikot Bisnis Muslim*. <http://www.arahmah.com/news/2013/03/27/biksu-budha-myanmar-menyeru-kaum-budha-untuk-memboikot-bisnis-muslim.html>. [9 April 2013, 13:33 WIB]
- [16] *Ibid.*
- [17] Patnistik, Egidius. (2012). *Rohingya Rentan Radikalisasi*. <http://internasional.kompas.com/read/2012/10/30/07543018/>. [31 Oktober 2012, 07:30 WIB]
- [18] *Ibid.*
- [19] _____. (2010). *Rakhine State population figured by SPDC*. <http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2689> [22 Maret 2013, 06:11 WIB]
- [20] _____. (2012). *Economy*. http://en.wikipedia.org/wiki/Rakhine_State [22 Maret 2012, 06:17 WIB]
- [21] Senoadi, Achmad. (2010). *Warga Lebih Percaya Emas Dibandingkan Bank*. <http://economy.okezone.com/read/2010/09/30/213/377525/warga-lebih-percaya-emas-dibandingkan-bank>. [22 Maret 2013, 06:24 WIB]
- [22] _____. (2012). *Indeks Persepsi Korupsi*. http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi. [21 Februari 2013, 09:42 WIB]
- [23] Weston, Fred. (2007). *Tragedy of Myanmar*. <http://www.marxist.com>. [21 Februari 2013, 09:56 WIB]
- [24] Armandhanu, Ita Lismawati F. Malau dan Denny. (2011). *Thein Sein: Presiden Terpilih Myanmar*. <http://dunia.news.iva.co.id/news/read/202982-presiden-terpilih-myanmar-dipilih>. [22 Maret 2013, 06:42 WIB]
- [25] Weston, Fred. (2007). *Tragedy of Myanmar*. <http://www.marxist.com>. [21 Februari 2013, 09:56 WIB]
- [26] _____. (2012). *Administration*. http://en.wikipedia.org/wiki/Rakhine_State [22 Maret 2013, 08:03 WIB]
- [27] Siddique, Habib. (2012). *Letter America Rohingya*. <http://asiantribune.com/news/2012/12/01/letter-america-rohinga-gya-question-%E2%80%93-part-2> [8 April 2013, 05:46 WIB]
- [28] _____. (2009). *Xinhua: Myanmar to construct first railroad to link western state*. <http://www.burmanet.org/news/2009/02/19/xinhua-myanmar-to-construct-first-railroad-to-link-western-state/> [27 Maret 2013, 13:35 WIB]
- [29] Anggoro, Wahyu Dwi. (2012). *Pembunuhan Etnis Rohingya Berlangsung Terorganisir*. <http://international.okezone.com/read/2012/11/12/411/717162/pembunuhan-etnis-rohingya-berlangsung-terorganisir>. [27 Maret 2013,
- [30] _____. (2012). *MUI: Tragedi Muslim Rohingya Berlatar Belakang Agama, Stop Genocide!!*. <http://www.voaislam.com/news/indonesia/2012/07/26/20007/muitragedi-muslim-rohingya-berlatar-belakang-agama-stop-genocide/> [27 Maret 2013, 13:50 WIB]
- [31] _____. (2001). *Anti-Muslim riots in Southern Burma*. <http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/200107/msg00034.html>. [14 April 2012, 07:25 WIB]
- [32] *Ibid.*
- [33] Win, Khin Maung. (2012). *Myanmar Bentuk Komisi Penyelidikan Konflik di Rakhine*. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/08/18/m8xifc-myanmar-bentuk-komisi-penyelidikan-konflik-di-rakhine>. [28 Maret 2013, 05:09 WIB]
- [34] _____. (2012). *Violence Escalates in Burma's Rakhine State*. http://www.voanews.com/content/violence_escalates_in_burma_rakhine_state/1205821.html [28 Maret 2013, 05:28 WIB]
- [35] Radio Free Asia. (2012). *Burma: Darurat Dideklarasikan di Rakhine*. http://www.unhcr.org/refworld/topic/45a5199f2_45a5faeb2_4fdb2f2da_0_RFA_.html [28 Maret 2013, 06:33 WIB]
- [36] Saputra, Vladia Tama. 2010. *Diskriminasi Etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: FISIP Universitas Jember
- [37] Mizzima News. (2012). *World Bank to fund 'model villages' in Burmese townships*. <http://reliefweb.int/report/myanmar/world-bank-fun%E2%80%98model-villages%E2%80%99-burmese-townships>. [28 Maret 2013, 07:59 WIB]
- [38] Ibrahim, Mohamed. (2013). *Burma Government made Model Village lands of Rohingya*. <http://www.ndphr.net/2013/03/burmgovernment-made-model-village.html>. [28 Maret 2013, 08:45 WIB]
- [39] *Ibid.*
- [40] *Ibid.*
- [41] Downing, John D. Hall. 2010. *Encyclopedia of Social Movement Media*. New York: Sage Publishing.
- [42] Minahan, James B. 2012. *Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia*. California: ABC-CLIO Publishing.
- [43] Agung, Himawan S. 2010. *Keberadaan MNC Migas di Myanmar (Studi Kasus Total dan Chevron di Blok Yadana Myanmar)*. Jember: FISIP Universitas Jember.
- [44] Steinberg, David I. Steinberg. 2001. *Burma: The State of Myanmar*. Washington D. C: Georgetown University Press.
- [45] Sakhong, Lian H. (2012). *The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma*. [pdf] http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES_AP01dynamics%28en%29.pdf, [8 April 2013, 16:58 WIB]
- [46] Alam, Mohammed Ashraf. (2011). *Marginalization The Rohingya in Arakan State*. [pdf] http://www.burmaconcern.com/pdf_f

- [tp/report/marginalization_rohingya.pdf](#)[9 April 2013, 04:43 WIB]
- [47] Jagan, Larry. (2006). *Myanmar Gets Serious about Reform*.http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/H18Ae01.html[9 April 2013, 07:12 WIB]
- [48] Pitaloka, Dyah Ayu. 2006. "Penolakan" Myanmar menjadi Ketua Standing Comitte Asean". Jember: FISIP Universitas Jember.
- [49] *Ibid.*
- [50] Saputra, Vladia Tama. 2010. "Diskriminasi Etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: FISIP Universitas Jember.
- [51] DWI. Myanmar Hapus Hutang Luar Negeri \$6Miliar. <http://www.beritasatu.com/asia/93906-myanmar-hapus-hutang-luar-negeri-6-miliar.html>. [22 Februari 2013, 10:09 WIB]
- [52] Sandhu, Kernial Singh. 1993. *Indian Communities in Southeast Asia. Sinagapura: Institute of Southeast Asian Studies.*
- [53] Mazaya, Hanin. (2013). *Biksu Budha Myanmar Menyeru Kaum Budha untuk Memboikot Bisnis Muslim*. <http://www.arahmah.com/news/2013/03/27/biksu-budha-myanmar-menyeru-kaum-budha-untukmemboikot-bisnis-muslim.html>[9 April 2013, 13:33 WIB]
- [54] F. Shah. (2012). *Rakhine are The Demographic Bomb of Myanmar but Not Rohingya* <http://www.ndphr.net/2012/09/rakhine-are-demographic-bomb-of-myanmar.htm>[10 April 2013, 07:36 WIB]
- [55] Thar, Khin Oo. (2011). *Irrawaddy: Maday Island deep-sea port no boon to locals*. <http://www.burmanet.org/news/2011/03/01/irrawaddy-maday-island-deepsea-port-no-boon-to-locals-%E2%80%93-khin-oo-thar>[10 April 2013, 07:53 WIB]
- [56] Montlake, Simon. (2012). *Myanmar's Ethnic Conflict Flares In Shadow Of Asian Oil Investments*. <http://www.forbes.com/sites/simonmontlake/2012/10/30/myanmars-ethnic-conflict-flares-in-shadow-of-asian-oil-investments/>[10 April 2013,
- [57] Zhi, Lin. (2009). *Myanmar Adds more Hydropower Plants in Western State*. http://news.xinhuanet.com/english/2009-12/07/content_12603866.htm[10 April 2013, 08:05 WIB]
- [58] _____. (2012). Information of Rakhine, <http://www.acvomyanmar.org/education/>[21 Maret 2013, 08:33 WIB] dan Xinhua News Agency. (2009). Myanmar Adds More Hydropower Plants in Western State http://en.chinagate.cn/features/energy/2009-12/07/content_19020928.htm [21 Maret 2013, 08:40 WIB]
- [59] Muftisany, Hafidz (Red.). (2012). *Muslim Rohingya Dituduh Penyebab Konflik Myanmar* <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/06/11/m5fz6emuslim-rohingya-dituduh-penyebabkonflik-myanmar>[10 April 2013, 08:57 WIB]
- [60] _____. (2013). *International Expert on Rakhine History Say no Rohingya In Myanmar*. <http://elevenmyanmar.com/politics/2738-international-experts-on-rakhine-history-say-no-rohingya-imyanmar>. [10 April 2013, 16:19 WIB]
- [61] Minahan, James B. 2012. *Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia*. California: ABC-CLIO Publishing.
- [62] Saputra, Vladia Tama. 2010. "Diskriminasi Etnis Rohingya oleh Pemerintah yanmar. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: FISIP Universitas Jember
- [63] Bahar, Abid. (2012). *Understanding the ohingya People: Similarities and Difference between Bengalis and the Rohingya People of Arakan*. <http://www.rohangpress.com/?p=204> [10 April 2013, 23:46 WIB]
- [64] Hanna Hindstrom, (2012), *Three Men Given Death Sentece for Murder that Sparked Riots*, <http://www.dvb.no/news/three-men-given-death-sentence-for-murder-that-sparked-riots/22512> [23 Maret 2013, 07:51 WIB]
- [65] *Ibid.*
- [66] _____. "Rohingya Rentan Radikalisme". Kompas. 30 Oktober 2012. Halaman- 9.
- [67] _____. (2012). *The Recent Situation of Maungdaw and Rathidaung Township*. <http://www.kaladanpress.org/news/151-news-2012/june012/3719-the-recent-situation-of-maungdaw-andrathidaung-townships>. [14 April 2013, 11:47 WIB]